

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009)
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007)
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Fuadi, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (rechstaat)*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Fatikhurohman dkk. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Harun, Refly, dkk. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2004),
- Latif, Abdul Latif. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009)
- Mahfud, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005)
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amanedemen Konstitusi*. ed 1. cet 3. (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. (Malang: Setara Press, 2014)

Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Jurnal

Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 4. Desember 2013. Hlm. 675

Darmadi, Nanang Sri. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. XXVI. No.2. Agustus 2011. Hlm. 25

Bintari, Aninditya Eka. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penagakan Hukum Tata Negara. *Jurnal Pandecta*. Vol. 8. No. 1 Januari 2013. Hlm. 91

Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6. No. 1. Januari-Februari 2017. Hlm. 63

Sumadi, Ahmad Fadlil. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 6. Desember 2011. Hlm. 853

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi> diakses pada tanggal 30 November 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis> diakses pada tanggal 30 November 2021